



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO **KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

MENURUT PENGELUARAN
2015-2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MENURUT PENGELUARAN
2015-2019

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN 2015-2019**

ISSN: 2657-1196

Nomor Publikasi: 82020.2005

Katalog: 9302020.8202

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 58 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah


Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:

Pertambangan

Sumber Ilustrasi:

unsplash.com  **freepik**

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh:

CV. Tara Taro

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah

Menurut Pengeluaran 2015-2019

Pengarah:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:

Faiszal Faqih Bachtiar, SST

Penulis:

Cahya Danu Rahman, SST

Pengolah Data:

Cahya Danu Rahman, SST

Desain:

Cahya Danu Rahman, SST

<https://haltengkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2015-2019 merupakan publikasi yang menyajikan pembahasan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran atau permintaan akhir. Pengeluaran ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, dan Ekspor Neto Antar Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya publikasi ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami mengharapkan tanggapan dan saran untuk meningkatkan kualitas publikasi yang akan datang.

Weda, Mei 2020

Kepala BPS

Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si



<https://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GRAFIK	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	19
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	22
2.6 EKSPOR - IMPOR	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PDRB PENGELUARAN 2015-2019	27
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	29
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	36
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga	36
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	38
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	40
3.2.5. Perubahan Inventori	41
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa.....	43
3.2.7. Impor Barang dan Jasa	44



Halaman

BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	49
DAFTAR PUSTAKA	55

<https://haltengkab.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1. PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2015 - 2019	30
TABEL 2. PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN,...	31
TABEL 3. DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2015- 2019.....	33
TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 MENURUT PENGELUARAN,.....	35
TABEL 5. INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.....	35
TABEL 6. SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2015-2019	36
TABEL 7. PERKEMBANGAN KOMPONEN KONSUMSI RUMAHTANGGA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.....	37
TABEL 8. PERKEMBANGAN PENGELUARAN AKHIR KONSUMSI LNPRT.....	38
TABEL 9. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	40
TABEL 10. PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR PMTB	41
TABEL 11. PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR PERUBAHAN INVENTORI	42
TABEL 12. PERKEMBANGAN EKSPOR.....	43
TABEL 13. PERKEMBANGAN IMPOR	44



<https://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GRAFIK 1. PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN,	30
GRAFIK 2. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2015-2019,.....	32
GRAFIK 3. PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2015-2019	32
GRAFIK 4. DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2015 - 2019.....	34

<https://haltengkab.bps.go.id>



<https://haltengkab.bps.go.id>

PENJELASAN SIMBOL

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	-
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	e
Angka sementara	:	*
Angka sangat sementara	:	**
Angka diperbaiki	:	r

2. SATUAN

barel	:	158,99 liter = 1/6,2898 m ³
hektar (ha)	:	10 000 m ²
kilometer (km)	:	1 000 meter m)
knot	:	1,8523 km/jam
kuintal	:	100 kg
KWh	:	1 000 Watt hour
MWh	:	1 000 KWh
liter (untuk beras)	:	0,80 kg
ons	:	28,31 gram
ton	:	1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka





<https://haltengkab.bps.go.id>

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang & jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah



Produksi

PDRB adalah seluruh permintaan akhir pengeluaran dari seluruh aktor ekonomi



Pengeluaran

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu



Pendapatan

BAB I PENDAHULUAN



<https://haltengkab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA),

perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.



Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"



- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.



- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

**KONSUMSI
AKHIR
RUMAH TANGGA**

**KONSUMSI AKHIR
LEMBAGA NON PROFIT
YANG MELAYANI
RUMAHTANGGA**

**KONSUMSI
AKHIR
PEMERINTAH**



**PEMBENTUKAN
MODAL
TETAP BRUTO**

**PERUBAHAN
INVENTORI**

**EKSPOR -
IMPOR**

<https://haltengkab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah



Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 12 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.



2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS



v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.



2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.



iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta

pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.



v **Metoda estimasi**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ **Metoda Langsung:**

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ **Metoda Tidak Langsung:**

Pendekatan Supply:

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)



2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.



iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.



v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. **Metoda Revaluasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. **Metoda Deflasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)



2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

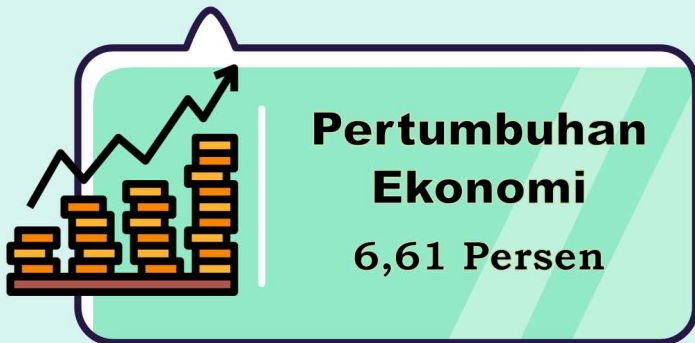
iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN



**PDRB
HALMAHERA TENGAH**

<https://haltengkab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2019 meningkat dari periode tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat menjadi sebesar 2.429,48 miliar rupiah dari sebelumnya 2.196,44 miliar rupiah. Kemudian jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), PDRB tahun 2019 juga meningkat yakni dari 1.428,47 miliar Rupiah di tahun 2018 menjadi 1.522,85 miliar Rupiah, atau meningkat sebesar 6,61%. Nilai perhitungan angka PDRB menurut Pengeluaran menghasilkan nilai yang sama meskipun dengan pendekatan yang berbeda. PDRB menurut pengeluaran menitikberatkan metodenya pada besarnya pengeluaran yang dikonsumsi oleh pelaku ekonomi.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung lesu, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah periode 2015 - 2019 tetap tumbuh positif dalam tiga tahun terakhir meskipun di tahun 2019 sedikit melambat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,8%; 6,99%; dan 6,61%. Nilai pertumbuhan terakhir menunjukkan kembali menguatnya kondisi ekonomi di Halmahera Tengah dan tentu nilainya masih relatif tinggi karena di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah didominasi pertumbuhan dari tiga komponen yaitu Investasi Fisik/PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), dan Konsumsi Pemerintah. Selain dari ketiga komponen utama, catatan ekonomi dari komponen ekspor juga mengalami peningkatan untuk beberapa periode tahun terakhir ini

Kompilasi PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut:



**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah
2015 - 2019**

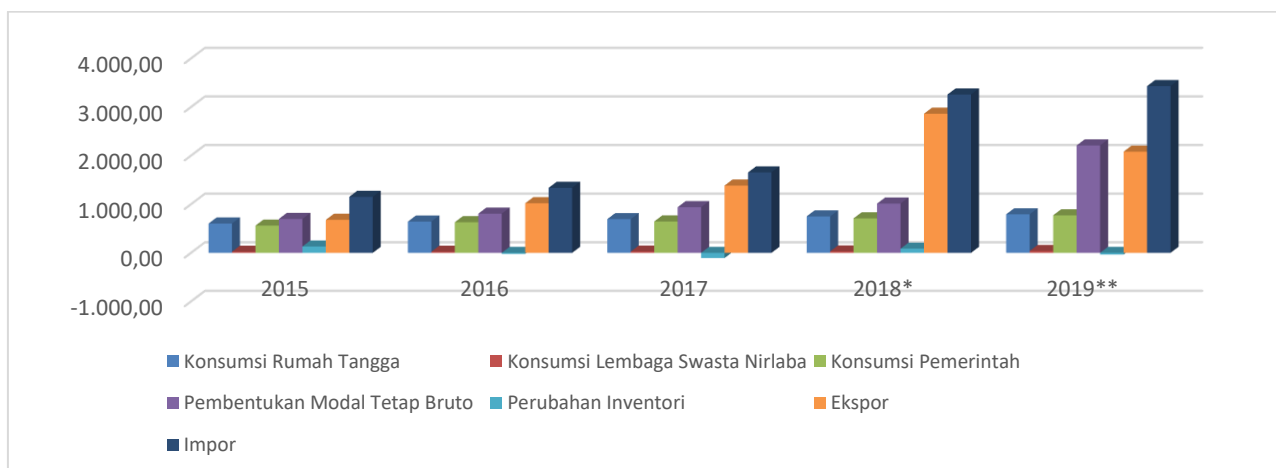
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	603,70	644,22	694,67	750,50	793,20
2. Konsumsi LNPRT	23,25	23,88	27,17	29,67	37,68
3. Konsumsi Pemerintah	560,53	631,72	646,32	710,48	771,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	698,65	806,95	941,00	1 014,27	2 210,58
5. Perubahan Inventori	130,63	-21,06	-106,86	86,32	-33,60
6. Ekspor	679,92	1 021,09	1 385,31	2 863,59	2 081,77
7. Impor	1 153,18	1 337,83	1 656,17	3 258,40	3 431,95
PDRB	1 543,50	1 768,97	1 931,45	2 196,44	2 429,48

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 117,95 % pada tahun 2019, naiknya persentase pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto berasal dari investasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan di wilayah kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, serta dari adanya kenaikan harga antar periode waktu (inflasi). Komponen Konsumsi LNPRT juga meningkat jauh dari tahun sebelumnya, yakni tumbuh 26,97%. Pada tahun 2019 adalah tahun politik, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang membuat pengeluaran seluruh partai politik meningkat jauh dari tahun sebelumnya.

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Halmahera Tengah 2015 - 2019 (Miliar Rupiah)**



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

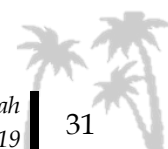
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015 - 2019

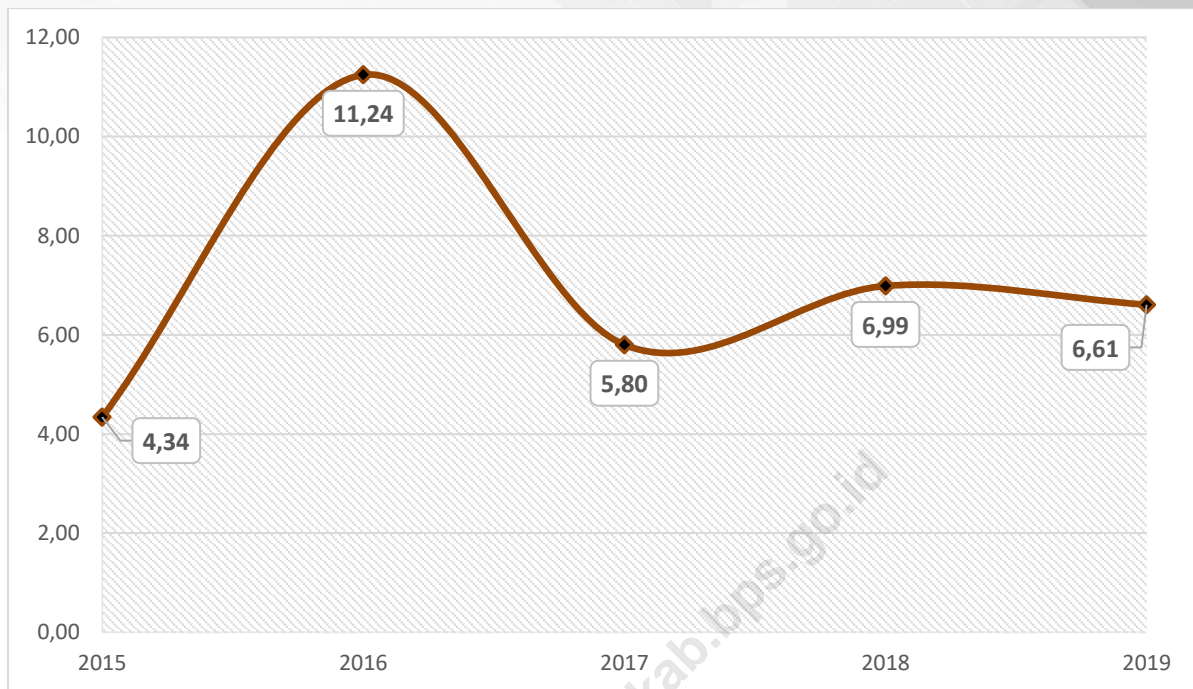
(Miliar Rupiah)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	476,03	484,46	506,20	522,58	540,17
2. Konsumsi LNPRT	17,05	17,49	19,49	20,04	25,14
3. Konsumsi Pemerintah	390,24	412,50	416,89	431,56	464,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	519,17	593,64	664,56	676,31	1.712,02
5. Perubahan Inventori	129,61	-13,34	-63,66	28,13	-14,86
6. Ekspor	570,47	808,66	1.101,19	1.990,22	1.267,49
7. Impor	968,13	1.041,41	1.309,48	2.240,38	2.471,97
PDRB	1 134,43	1 261,99	1 335,19	1 428,47	1 522,85

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Halmahera Tengah terus meningkat, yakni sebesar 1.134,43 miliar Rupiah (2015); 1.261,99 miliar Rupiah (2016); 1.335,19 miliar Rupiah (2017); 1.428,47 miliar Rupiah (2018) dan 1.522,85 miliar Rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung fluktuatif, yakni tumbuh 11,24 persen pada tahun 2017 menjadi 5,97 persen pada tahun 2018 kemudian menguat kembali sebesar 6,82 persen pada tahun 2019. Kondisi ini tidak lepas dari peran ekspor dan Impor yang terjadi di Halmahera Tengah selama periode 2019. Tingginya kebutuhan untuk memenuhi konsumsi sehingga mendorong impor barang dan jasa dari luar daerah Halmahera Tengah. Hal ini juga didorong oleh bertambahnya tenaga jasa Pendidikan dan Kesehatan untuk Kabupaten Halmahera Tengah.

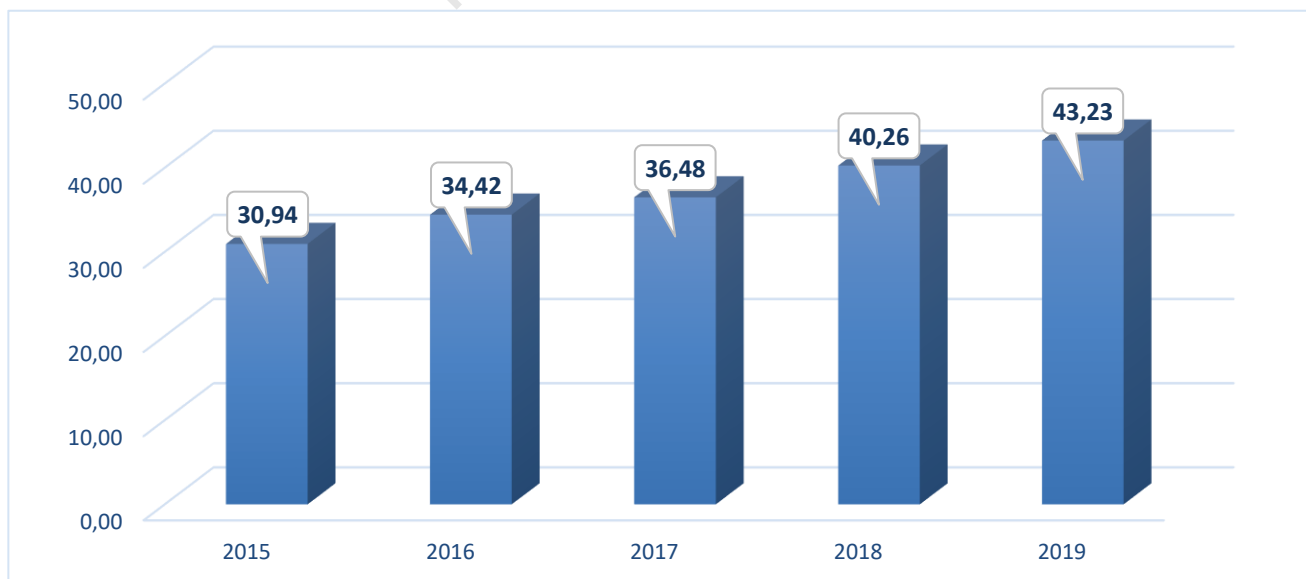


**Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2015 - 2019 (persen)**



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

**Grafik 3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)**



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga Berlaku selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 30,94 juta rupiah. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2019, tercatat

PDRB Perkapita Kabupaten Halmaherah sebesar 43,23 juta rupiah. Nilai tersebut mengartikan bahwa pada tahun 2019 nilai PDRB yang dihasilkan per satu orang adalah 43,23 juta rupiah.

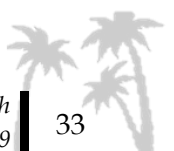
Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015- 2019

Komponen Pengeluaran (1)	(%)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	39,11	36,42	35,97	34,17	32,65
2. Konsumsi LNPRIT	1,51	1,35	1,41	1,35	1,55
3. Konsumsi Pemerintah	36,32	35,71	33,46	32,35	31,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,26	45,62	48,72	46,18	90,99
5. Perubahan Inventori	8,46	-1,19	-5,53	3,93	-1,38
6. Ekspor	44,05	57,72	71,72	130,37	85,69
7. Impor	74,71	75,63	85,75	148,35	141,26
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

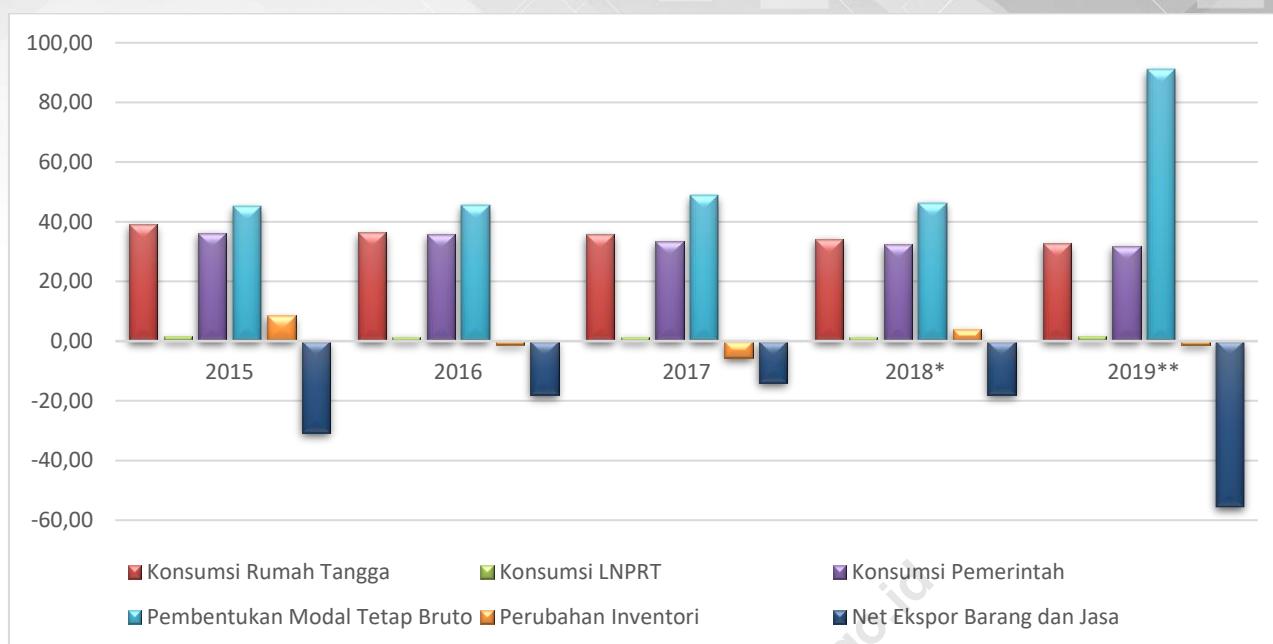
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E-X) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah, sebagian besar proporsinya guna memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 40 persen. Komponen ekspor pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yang signifikan jika dilihat dari periode tahun sebelumnya yaitu tumbuh hampir dua kali lipat karena dicabutnya aturan mengenai pelarangan ekspor barang mineral mentah ke luar negeri. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 1/2018), Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2018 (Permen ESDM 5/2018), dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ESDM 6/2018). Sedangkan pada tahun 2019, komponen ekspor turun dibanding tahun sebelumnya. Adanya peraturan larangan ekspor nikel yang diberlakukan per 31 Desember 2019 membuat beberapa perusahaan tambang nikel mengurangi produksi nikelnya.



Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015 - 2019 (persen)



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 30 - 35 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cukup proporsional. Di sisi lain, pada tahun 2015-2019 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor (Net Ekspor), menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kondisi pada periode itu menunjukkan posisi "defisit" neraca perdagangan di Halmahera Tengah. Kondisi ini dibuktikan nyata di lapangan yaitu banyaknya produk barang dan jasa yang masuk ke Halmahera Tengah, baik itu dari Ternate, Halmahera Selatan dan bahkan dari luar provinsi Maluku Utara.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2015 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni sebesar minus 4,34 persen (2015); 11,24 persen (2016); 5,80 persen (2017); 6,99 persen (2018) dan terakhir 6,61 persen (2019). Berikutnya dari grafik 5 terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB dari tahun 2015-2019.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran (1)	(%)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9,95	1,77	4,49	3,24	3,37
2. Konsumsi LNPRT	9,00	2,57	11,46	2,82	25,41
3. Konsumsi Pemerintah	10,57	5,71	1,06	3,52	7,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,17	14,34	11,95	1,77	153,14
5. Ekspor	22,97	41,75	36,17	80,73	-36,31
6. Impor	59,15	7,57	25,74	71,09	10,34
PDRB	4,34	11,24	5,80	6,99	6,61

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 - 2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	126,82	132,98	137,23	143,61	146,84
2. Konsumsi LNPRT	136,36	136,56	139,37	148,04	149,89
3. Konsumsi Pemerintah	143,64	153,14	155,03	164,63	166,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	134,57	135,93	141,60	149,97	129,12
5. Perubahan Inventori	100,79	157,91	167,85	306,91	226,13
6. Ekspor	119,19	126,27	125,80	143,88	164,24
7. Impor	119,11	128,46	126,47	145,44	138,83
PDRB	136,06	140,17	144,66	153,76	159,54

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Pada tabel 6 dapat dilihat nilai sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran. Sumber pertumbuhan menunjukkan seberapa besar bagian dari suatu komponen dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, peran PMTB dalam bentuk investasi fisik terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 72,5 persen. Nilai sumber pertumbuhan PMTB adalah yang terbesar, hal ini didorong oleh pesatnya pembangunan wilayah industri pengolahan hasil tambang nikel di wilayah Kecamatan Weda Tengah.

⁶ Indeks perkembangan



Untuk periode 2015-2018, ekspor barang dan jasa selalu memiliki peran yang penting dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dengan kontribusinya yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	(%)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,96	0,74	1,72	1,23	1,23
2. Konsumsi LNPRT	0,13	0,04	0,16	0,04	0,36
3. Konsumsi Pemerintah	3,43	1,96	0,35	1,10	2,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,29	6,56	5,62	0,88	72,50
5. Perubahan Inventori	13,82	-12,60	-3,99	6,87	-3,01
6. Ekspor	9,80	21,00	23,18	66,58	-50,59
7. Impor	33,09	6,46	21,24	69,72	16,21
PDRB	4,34	11,24	5,80	6,99	6,61

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 2015 - 2019.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Halmahera Tengah, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.



Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2019

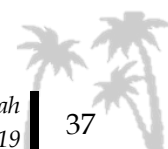
Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga	603 695,92	644 215,70	694 674,79	750 503,88	793 202,92
a. ADHB (Juta Rupiah)					
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	476 030,15	484 455,61	506 198,43	522 583,55	540 169,46
Proporsi terhadap PDRB	39,11	36,42	35,97	34,17	32,65
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Juta Rupiah)					
a. ADHB (Juta Rupiah)	12,10	12,54	13,12	13,76	14,11
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	9,54	9,43	9,56	9,58	9,61
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi RT	9,95	1,77	4,49	3,24	3,37
c. Perkapita	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05
Jumlah penduduk (orang)	48 414	49 807	51 315	52 813	55 370

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015–2019 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami perubahan yang berfluktuatif, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2015–2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi, yaitu 39,11 persen (2015); 36,42 persen (2016); 35,97 persen (2017); 34,17 persen (2018) dan 32,65 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 39,11 persen kemudian kembali melambat namun tetap pada kisaran 30-36 persen.

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)



Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” terus meningkat dari 8 s.d 9 juta per kapita. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Halmahera Tengah dari periode 2013-2018. Bahkan besarnya kontribusi terhadap PDRB Halmahera Tengah terus meningkat seiring bertambahnya periode waktu.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2019

U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rupiah)	23 251,99	23 884,61	27 168,52	29 673,34	37 675,61
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	17 052,24	17 489,73	19 494,20	20 043,75	25 135,90
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,51	1,35	1,41	1,35	1,55
Pertumbuhan (ADHK 2010)	9,00	2,57	11,46	2,82	25,41

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

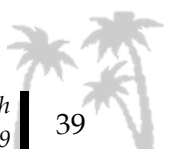
Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara umum pada tahun-tahun yang merupakan tahun politik seperti 2015 dan 2019, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 kemarin karena adanya momen kampanye

dan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Meskipun melambat pada tahun 2016, konsumsi pengeluaran LNPRT kembali meningkat lagi menyesuaikan kondisi yang stabil di Halmahera Tengah usai tahun politik. Gambaran umum mengenai pengeluaran LNPRT antara lain selain Lembaga politik seperti ormas, juga Lembaga non Profit seperti Yayasan, LSM dan Perkumpulan Sosial Kegiatan Masyarakat Umum.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.



Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmehera Tengah 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rupiah</i>)	560 528,70	631 716,37	646 319,77	710 482,38	771 792,14
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rupiah</i>)	390 236,31	412 503,19	416 891,96	431 564,53	464 862,31
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	36,32	35,71	33,46	32,35	31,77
Pertumbuhan (ADHK 2010)	10,57	5,71	1,06	3,52	7,72

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2015-2019, pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan porsi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah yaitu kurang lebih tiga puluh persen dari total PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan layanan jasa pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total mengalami peningkatan namun jika dilihat dari pertumbuhannya yang dinilai atas dasar harga konstan, terjadi kontraksi atau perlambatan pertumbuhan yang dapat diartikan bahwa proporsi pengeluaran untuk pemerintah lebih dapat dikendalikan dan dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat pembangunan secara inklusif.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015–2019 berfluktuasi. Terlihat pada tahun 2018 pengeluaran akhir yang sifatnya untuk investasi fisik cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena mulai banyaknya pembangunan baik jalan maupun bangunan di Halmahera Tengah pada tahun tersebut. Pembangunan

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

infrastruktur yang tepat dan efisien dapat mendorong kegiatan perekonomian di Halmahera Tengah lebih baik. Berikut ini disajikan perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Halmahera Tengah pada tabel 12 berikut:

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2019

U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB	698 649,92	806 952,87	940 999,90	1 014 270,27	2 210 580,60
a. ADHB (<i>Juta Rupiah</i>)					
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rupiah</i>)	519 166,78	593 635,65	664 556,86	676 312,08	1 712 016,69
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	45,26	45,62	48,72	46,18	90,99
Pertumbuhan PMTB	15,17	14,34	11,95	1,77	153,14

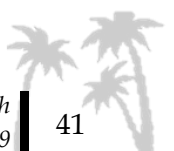
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Bukti fisik secara langsung yang dapat diamati dari perkembangan PMTB atau sering disebut sebagai investasi fisik adalah mulai adanya pembangunan Rumah Susun di Halmahera Tengah pada tahun 2018 Selain itu adanya perbaikan jalan dari sirtu menjadi aspal di beberapa daerah di Weda-Patani dan tumbuh menjamurnya pembangunan perumahan milik warga dan kos-kosan juga merupakan bukti adanya investasi fisik.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).



**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2018**

U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Juta Rupiah</i>)	130 631,71	- 21 061,11	- 106 857,79	86 319,17	- 33 595,10
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rupiah</i>)	129 608,83	- 13 337,78	- 63 661,22	28 125,36	- 14 856,79
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	8,46	-1,19	-5,53	3,93	-1,38

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 130,6 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2016. Nilai negatif tercatat pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar minus 21,06 miliar rupiah dan minus 104,47 miliar rupiah. Tanda negatif pada dua tahun tersebut mengindikasikan adanya pengurangan persediaan barang (stok akhir tahun lebih sedikit daripada awal tahun). Begitu juga terjadi di tahun 2019 kondisi perubahan inventori menunjukkan nilai negatif.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Halmahera Tengah berfluktuasi antar periode. Tercatat, proporsi perubahan inventori hanya bernilai positif pada tahun 2015 dan 2018 yaitu 8,46 persen dan 3,93 persen. Selanjutnya pada 2016, 2017 dan 2019 bernilai negatif yaitu -1,19 persen, -5,53 persen dan -1,38 persen. Umumnya perubahan inventori berkontribusi kecil terhadap total PDRB suatu daerah, namun nilai dan keberadaannya juga perlu menjadi perhatian karena nilai positif maupun negatif dapat menggambarkan kondisi persediaan barang dan bahan di daerah tersebut.



3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah, namun dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 12. Perkembangan Ekspor
Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2018**

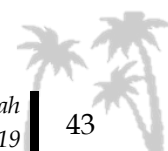
U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	679,92	1 021,09	1 385,31	2 863,59	2 081,77
a. ADHB (Miliar Rupiah)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	570,47	808,66	1 101,19	1 990,22	1 267,49
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	44,05	57,72	71,72	130,37	85,69
Pertumbuhan ⁹	22,97	41,75	36,17	80,73	-36,31

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Secara total, dalam kurun waktu 2015-2019 nilai ekspor barang dan jasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun di tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 679,92 miliar rupiah meningkat signifikan hingga mencapai 2.081,77 miliar rupiah pada tahun 2019. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat meskipun di tahun 2019 menurun dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pada periode 2015 s.d 2019, proporsi ekspor dalam PDRB bergerak sejalan yaitu cenderung meningkat dari 44,05 persen pada tahun 2015 menjadi 85,69 persen di tahun 2019. Namun besarnya proporsi ekspor harus dicermati bersama dengan data impor yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya

Tercatat pada 2015 dan tahun 2015, nilai ekspor barang dan jasa mulai perlahan naik meskipun ekspor ke luar negeri dari hasil tambang mentah nikel tidak diperbolehkan. Barulah di tahun 2017 dan 2018, hasil pertambangan berupa (*ore*) nikel mulai di ekspor dikarenakan mulai beroperasinya *smelter*.

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010



Kemudian pada tahun 2019 ekspor Halteng menurun dikarenakan adanya aturan pelarangan kembali ekspor nikel yang mulai diberlakukan per 1 Desember 2019. Hal ini membuat beberapa perusahaan mengurangi produksi nikelnya dan ada juga perusahaan smelter yang hampir tidak beroperasi. Hal tersebut tercermin dari penurunan ekspor sebesar 36,31 persen pada tahun 2019.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019, nilai impor barang dan jasa Kabupaten Halmahera Tengah cenderung meningkat. Nilai impor barang dan jasa yang tinggi sejatinya terdiri dari impor antara daerah dan impor barang dan jasa dari luar negeri. Meningkatnya impor juga sekaligus mengimbangi ekspor yang tinggi di Halmahera Tengah, artinya pada lima tahun terakhir kebutuhan barang dan jasa yang berasal dari luar Halmahera Tengah terus meningkat.

**Tabel 13. Perkembangan Impor
Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	1 153,18	1 337,83	1 656,17	3 58,40	3.431,95
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	968,13	1.041,41	1.309,48	2.240,38	2.471,97
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	74,71	75,63	85,75	148,35	141,26
Pertumbuhan ¹⁰	59,15	7,57	25,74	71,09	10,34

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

A stylized illustration of a tropical beach scene. On the left, a palm tree trunk and fronds are visible. In the foreground, there are various green tropical plants, including a large monstera leaf. The background shows a blue ocean with white-capped waves, a sandy beach, and a dark brown landmass under a light blue sky.

BAB IV

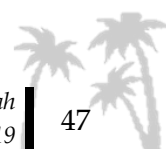
PENUTUP

<https://haltengkab.bps.go.id>

<https://haltengkab.bps.go.id>

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah terhadap ekonomi luar daerah.



<https://haltengkab.bps.go.id>

LAMPIRAN



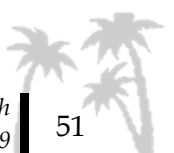
<https://haltengkab.bps.go.id>

Lampiran 1. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2015-2019 (Miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	603,70	644,22	694,67	750,50	793,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	23,25	23,88	27,17	29,67	37,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	560,53	631,72	646,32	710,48	771,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	698,65	806,95	941,00	1.014,27	2.210,58
5. Perubahan Inventori	130,63	-21,06	-106,86	86,32	-33,60
6. Ekspor	679,92	1.021,09	1.385,31	2.863,59	2.081,77
7. Impor	1.153,18	1.337,83	1.656,17	3.258,40	3.431,95
PDRB	1.543,50	1.768,97	1.931,45	2.196,44	2.429,48

Lampiran 2. PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	476,03	484,46	506,20	522,58	540,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	17,05	17,49	19,49	20,04	25,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	390,24	412,50	416,89	431,56	464,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	519,17	593,64	664,56	676,31	1.712,02
5. Perubahan Inventori	129,61	-13,34	-63,66	28,13	-14,86
6. Ekspor	570,47	808,66	1.101,19	1.990,22	1.267,49
7. Impor	968,13	1.041,41	1.309,48	2.240,38	2.471,97
PDRB	1.134,43	1.261,99	1.335,19	1.428,47	1.522,85



Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	39,11	36,42	35,97	34,17	32,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,51	1,35	1,41	1,35	1,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	36,32	35,71	33,46	32,35	31,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,26	45,62	48,72	46,18	90,99
5. Perubahan Inventori	8,46	-1,19	-5,53	3,93	-1,38
6. Ekspor	44,05	57,72	71,72	130,37	85,69
7. Impor	74,71	75,63	85,75	148,35	141,26
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,95	1,77	4,49	3,24	3,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,00	2,57	11,46	2,82	25,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,57	5,71	1,06	3,52	7,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,17	14,34	11,95	1,77	153,14
5. Perubahan Inventori	727,60	-110,29	-377,30	144,18	-152,82
6. Ekspor	22,97	41,75	36,17	80,73	-36,31
7. Impor	59,15	7,57	25,74	71,09	10,34
P D R B	4,34	11,24	5,80	6,99	6,61

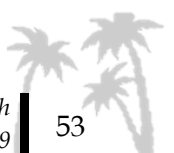


Lampiran 5. Indeks Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	126,82	132,98	137,23	143,61	146,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,36	136,56	139,37	148,04	149,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	143,64	153,14	155,03	164,63	166,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	134,57	135,93	141,60	149,97	129,12
5. Perubahan Inventori	100,79	157,91	167,85	306,91	226,13
6. Ekspor	119,19	126,27	125,80	143,88	164,24
7. Impor	119,11	128,46	126,47	145,44	138,83
P D R B	136,06	140,17	144,66	153,76	159,54

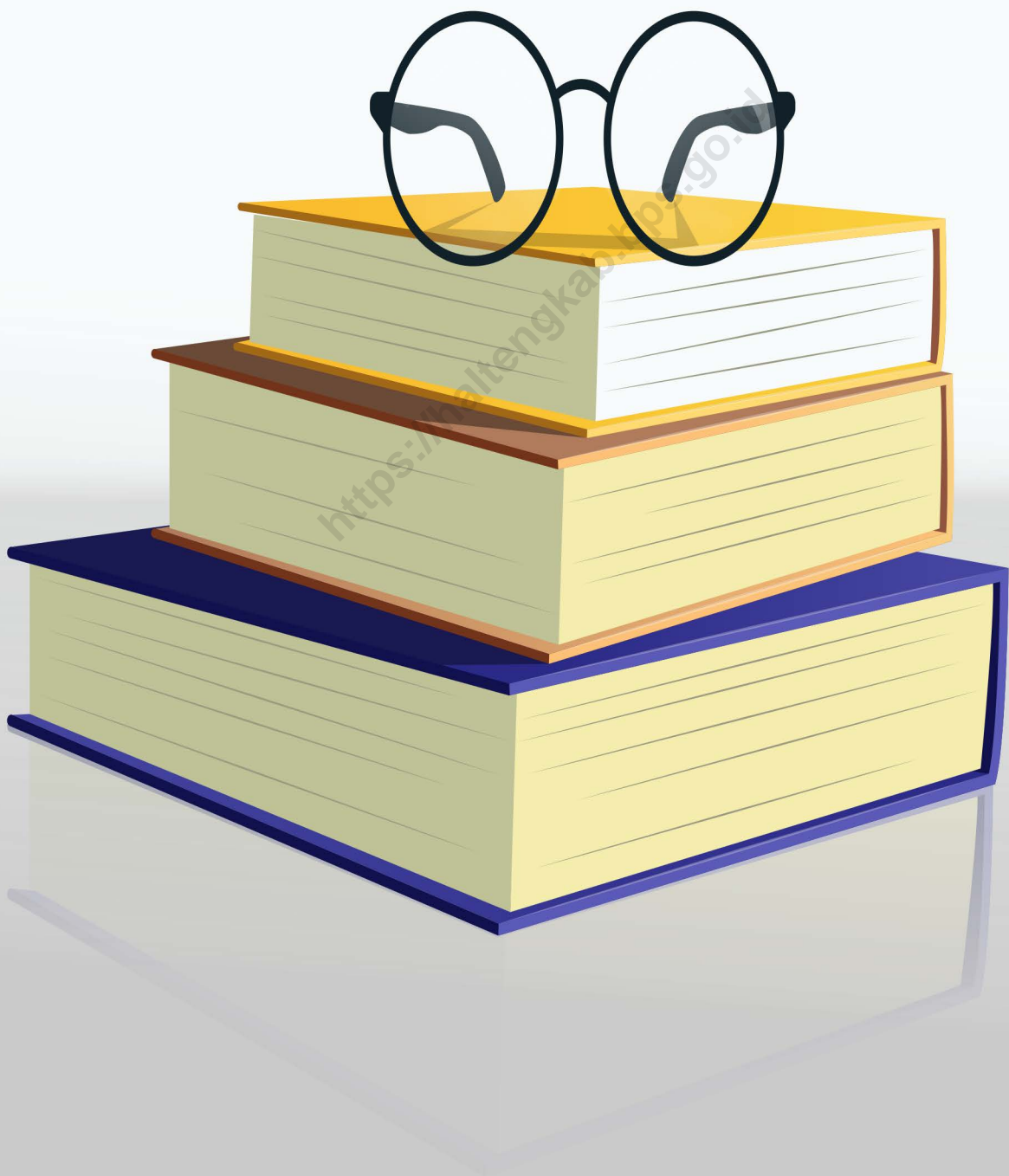
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,06	4,86	3,20	4,65	2,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,40	0,15	2,05	6,23	1,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,46	6,62	1,23	6,19	0,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,97	1,01	4,17	5,91	-13,90
5. Perubahan Inventori	-12,18	56,67	6,30	82,84	-26,32
6. Ekspor	-16,41	5,94	-0,37	14,37	14,15
7. Impor	-10,85	7,85	-1,55	15,00	-4,54
P D R B	5,57	3,02	3,20	6,29	3,75



<https://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA



<https://haltengkab.bps.go.id>

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. 8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://haltengkab.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

<http://haltengngkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**
JL. Poros Weda Payahe
Email : bps8202@bps.go.id
Homepage : haltengngkab.bps.go.id

